

Setelah Ada Posko, Warga Kini Buang Sampah ke Pinggir Jalan



IDN/ANTARA

RUANG KELAS SEKOLAH RUSAK DI LEBAK

Sejumlah siswa melihat ruang kelas yang rusak di SD Negeri 1 Parakanbeusi di Lebak, Banten, Rabu (18/1). Menurut pihak sekolah sebanyak empat ruang kelas kondisinya rusak berat dan sudah tidak digunakan lagi selama bertahun-tahun sehingga guru serta siswa sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk segera memperbaiki.

MERASA PEMKAB TIDAK ADIL DALAM PEMBERIAN BONUS

Atlet Disabilitas Ngadu Ke DPRD Kabupaten Tangerang

Ini tidak adil menurut undang-undang, padahal kita juara umum, kenapa bonusnya bisa lebih kecil. KONI saja Rp 30 juta, tapi kita malah Rp 15 juta, seharusnya kan kita lebih besar karena juara umum, kata Yudi salah seorang atlet Disabilitas dari National Paralympic Committee Indonesia.

TANGERANG (IM)- Atlet Disabilitas dari National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang terkait pemberian bonus yang dirasakan tidak adil. Kedatangan para atlet difabel yang telah menjadi juara umum dan menyumbangkan

banyak medali emas ini karena tidak diberikan bonus yang setara dengan atlet lain pada umumnya.

Atlet NPCI Kabupaten Tangerang dari cabang olahraga (Cabot) panahan, Yudi mengatakan seharusnya bonus yang diberikan Pemkab Tangerang kepada atlet itu setara atau adil sesuai Un-

dang-Undang (UU) Republik Indonesia.

Kenyataannya, berdasarkan informasi yang NPCI dapat bahwa atlet Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tangerang mendapat bonus yang lebih besar yaitu senilai Rp 30 juta untuk medali emas, sedangkan atlet difabel hanya diberikan setengahnya atau Rp 15 juta.

"Ini tidak adil menurut undang-undang, padahal kita juara umum, kenapa bonusnya bisa lebih kecil. KONI saja Rp 30 juta, tapi kita malah Rp 15 juta, seharusnya kan kita lebih besar karena juara umum," kata Yudi, Rabu (18/1).

Dengan begitu, Yudi berharap Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar dapat mendorong tim-tim terkait

masalah anggaran ini agar dapat menyetarakan bonus dengan atlet lainnya. Misalnya, selain atlet KONI pemberian bonus besar juga dikabarkan diberikan kepada juara MTQ.

"Kalau memang mau disetarakan ya semuanya juga, supaya tidak kesannya diskriminatif ya," ucap Yudi.

Sementara itu, Ketua NPCI Kabupaten Tangerang, Sri Rahayu juga mengeluhkan terkait tidak adanya reward yang diberikan kepada tim official seperti pelatih dan pendamping atlet. Padahal, kata Sri, tugas dari pendamping atlet juga

terhitung sangat berat, sehingga perlu adanya penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang.

"Pendamping itu tugasnya lebih berat, kami berharap ada

perhatian khusus dari pemerintah daerah," ucapnya.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Komisi II, Ahyani menegaskan akan terus melakukan pengawalan hingga tuntutan dari para atlet ini dapat dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Di mana seharusnya ada kesetaraan bonus dengan atlet KONI yang dalam hal ini memiliki fisik yang sempurna.

"Harusnya setara, bahkan ada nilai plusnya, karena NPCI itu juara umum, bukan malah dikurangkan. Masa di KONI Medali Emas itu Rp 30 juta, perak, Rp 15 juta, dan Perunggu Rp 8 juta, tetapi NPCI malah di bawahnya, kalau didiamkan bisa berbahaya ini," pungkasnya. ● pp

Pj Gubernur Banten Optimistis Angka Stunting Turun Melalui Kekompakan

LEBAK (IM)- Pj Gubernur Banten, Al Muktabar optimistis angka prevalensi stunting atau anak yang mengalami kekerdilisan akibat gagal tubuh akan turun melalui kekompakan semua instansi pemerintah daerah untuk penanganannya sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

"Kita angka stunting di Provinsi Banten saat ini ada penekanan 4,5 persen, sehingga turun menjadi sekitar 20,1 persen," kata Al Muktabar saat kegiatan Pelayanan Grebek Keluarga Berencana (KB) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kampung Badui Ciboleger yang diinisiasi oleh Persit Kartika Chandra dan BKK-BN Banten, Rabu (18/1).

Pemerintah daerah berkomitmen untuk penanganan masalah gizi buruk, stunting dan kemiskinan ekstrem, kata Eni.

Sementara itu, Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana, Ny. Rahma Dandung Abdurachman mengatakan seluruh pengurus persit untuk meningkatkan kepedulian dan kebersamaan untuk penanganan masalah gizi buruk, stunting dan kemiskinan ekstrem.

Untuk itu, Persit Pusat memberikan bantuan kepada anak-anak membutuhkan khusus dan sakit berat di Kampung Badui yang perlu mendapatkan penanganannya.

Di mana anak-anak membutuhkan khusus setiap tahun di Indonesia meningkat dengan usia rentang 5-18 tahun dan baik yang sekolah khusus inklusi.

"Semoga bantuan untuk anak khusus itu bermanfaat bagi anggota keluarganya," katanya. ● pra

"Kami meyakini angka stunting di Banten menurun dengan kekompakan itu," katanya menjelaskan.

Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat, Eni Gustina mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Lebak yang terealisasi program peserta kontrasepsi pelayanan KB dengan MKJP hingga mencapai 1.400 pasangan usia subur.

Program pelayanan KB dengan MKJP itu antara lain implan, IUD dan MOP yang ditargetkan BKKBN Pusat sebanyak 1.000 PUS.

"Kami meyakini keberhasilan pelayanan KB dengan MKJP mampu menurunkan kasus stunting, gizi buruk dan kemiskinan ekstrem," kata Eni.

Sementara itu, Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana, Ny. Rahma Dandung Abdurachman mengatakan seluruh pengurus persit untuk meningkatkan kepedulian dan kebersamaan untuk penanganan masalah gizi buruk, stunting dan kemiskinan ekstrem.

Untuk itu, Persit Pusat memberikan bantuan kepada anak-anak membutuhkan khusus dan sakit berat di Kampung Badui yang perlu mendapatkan penanganannya.

Di mana anak-anak membutuhkan khusus setiap tahun di Indonesia meningkat dengan usia rentang 5-18 tahun dan baik yang sekolah khusus inklusi.

"Semoga bantuan untuk anak khusus itu bermanfaat bagi anggota keluarganya," katanya. ● pra

AKTIFKAN PERAN WARGA BINAAN

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Serahkan Televisi untuk Pos Keamanan

TANGERANG (IM)- Pos Keamanan atau bangunan yang kecil dengan luas bervariasi yang hampir rata-rata ada di setiap rukun tetangga (RT), sebagian besar kurang difungsikan, karena masyarakat kurang aktif memberdayakan Pos Kamling atau Pos Keamanan Lingkungan tersebut.

Untuk memaksimalkan fungsi Pos Keamanan tersebut, Babinsa Sukamanah, Koptu Sugeng Riyadi Koramil 12/Rajeg bersama Bhabinkamtibmas melalui cara kosmos memberikan bantuan satu unit TV layak pakai sebagai Inventaris di Pos Keamanan/Poskamling di Perum Griya Asri Sukamanah 1 RT 007 / 012 Desa Sukamanah, Kec Rajeg, Kab Tangerang, Rabu (18/1).

Dikatakan Koptu Sugeng Riyadi, penyerahan TV layak pakai ini untuk mendorong dan mengaktifkan Pos keamanan sebagai garda terdepan, menjaga keamanan lingkungan dan wujud Kemanunggalan TNI - Rakyat.

"Pemberian televisi dilakukan agar warga betah saat melaksanakan ronda malam di pos kamling. Saat ronda malam biasanya jenuh apabila tidak ada hiburan, oleh karenanya bantuan televisi ini tentu sangat berguna," kata Babinsa.

Di tempat terpisah, Dan-dim 0510/Tigaraksa, Letkol Arh SS Bandjar melalui Danramil 12/Rjg Kapten Inf Sutrisno mengatakan, penyerahan inventaris Pos Keamanan, tujuannya agar pos lebih diaktifkan ke depannya sehingga memberikan manfaat keamanan kepada warga lingkungannya.

"Adanya inventaris televisi, agar para warga bisa

lebih aktif kumpul sambil menjalankan kamtibmas. Jadi tidak suntuk di saat menjaga lingkungannya. Ini bentuk wujud Kemanunggalan TNI - Rakyat," kata Danramil.

Danramil berpesan dengan adanya televisi, petugas keamanan jangan sampai terlena. Kewajiban untuk keliling lingkungan tetap harus dilakukan secara berkala untuk memantau situasi kamtibmas.

Sementara itu, warga Perum Griya Asri Sukamanah 1 mengucapkan terima kasih kepada Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang sangat peduli dengan pos keamanan di lingkungan.

"Adanya televisi ini, akan menambah semangat warga dalam melakukan ronda malam demi keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal," kata warga. ● joh



IST

Aktifkan peran Warga Binaan, Babinsa dan Bhabinkamtibmas menyerahkan televisi untuk Pos Keamanan.

TANGERANG (IM)- Tabiat sejumlah warga membuang sampah sembarangan di jalan raya kawasan Ciledug, Kota Tangerang belum juga berubah. Padahal, sudah lebih dari dua pekan masalah sampah yang berjejer di tengah Jalan Raden Patah, Ciledug, ramai diperbincangkan dan menjadi sorotan. Pemerintah Kota Tangerang pun telah melakukan sejumlah langkah. Pemkot membangun dua posko pantau sampah di dua titik, yakni dekat jembatan Kali Parung Serab dan seberang Perumahan Griya Ciledug. Sementara, di tengah jalan raya itu, dipasang plang peringatan untuk tidak membuang sampah sembarangan di sana karena itu bukan tempat pembuangan sampah (TPS).

Namun, kini masyarakat justru membuang sampah di pinggir jalan raya. "Iya sekarang makin ramai di sini (di pinggir jalan) buang sampahnya," kata Eko warga sekitar yang kebetulan sedang melintas, Rabu (18/1). "Iya kemarin-kemarin mereka

buang di tengah (jalan raya), kan sekarang udah ada larangan, jadi mungkin mereka pindah (buang sampah)

ke sini," tambah dia. Berdasarkan pantauan Selasa (17/1) malam, di sepanjang tengah jalan raya Jalan Raden Patah Ciledug, tak ada lagi sampah berjejer di separator tengah jalan raya seperti sebelumnya. Namun, usai diteliti lebih jauh, sampah-sampah masih banyak ditemukan di pinggir jalan. Ada beberapa titik di jalan raya itu yang dijadikan masyarakat sebagai tempat pembuangan sampah.

Salah satu titik yang sampahnya menumpuk ada di seberang gang Kampung Pulo, Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug. Sejak sekitar pukul 23.30 WIB hingga pukul 24.50 WIB, terlihat tiga pengendara sepeda motor yang berhenti untuk membuang sampah di sana.

Salah satu pengendara motor bahkan membawa istri dan anaknya saat membuang sampah. Saat berhenti di titik itu, sang anak bergegas turun dan membuang sebuah kantong plastik berwarna merah.

Pengendara lain terpantau menjatuhkan kantong plastik berwarna hitam besar yang berisi berbagai jenis sampah rumah tangga. ● pp

STATUS PPKM DICABUT

Jemaat Rayakan Imlek di Boen Tek Bio Diprediksi Meningkat 60 Persen

TANGERANG (IM)- Pengelola Klenteng Boen Tek Bio yang berada di Kota Tangerang memprediksi adanya peningkatan jemaat yang merayakan Imlek 2023. Hal ini setelah pemerintah mencabut status PPKM atau Pembatasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

Ketua Umum Yayasan Vihara Nirmala, Yuliyu mengatakan, peningkatan jemaat akan terjadi sekitar 60 persen dari tahun 2022 lalu.

"Kalau tahun lalu, jemaat sekitar 500 orang, tapi karena tahun ini status PPKM sudah dicabut, maka kami prediksi adanya peningkatan jumlah jemaat 60 persen atau sekitar 1.200 orang, sesuai dengan kapasitas klenteng yang mampu menampung seribu orang," katanya, Rabu, (18/1).

Lanjut Yuliyu, bukan cuma jumlah jemaat, namun jumlah lilin persembahan imlek yang tiba di klenteng tertua di Tangerang itu pun juga mengalami peningkatan cukup signifikan. "Kita belum hitung secara angka pasti, berapa peningkatannya, tapi untuk persentasenya sekitar 50 persen meningkat lilin yang datang ke sini. Makanya, kami pun juga sedang mengatur untuk meletakkan lilin-lilinnya," ujarnya.

Meski demikian, lanjutnya, pengelola tetap menerapkan aturan protokol kesehatan atau prokes Covid-19 3M, yakni menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. "Kita tetap terapkan prokes Covid-19 meski sudah tidak dibatasi. Dan kita tetap minta jemaat mengakses PeduliLindungi," ungkapnya. ● pp



IDN/ANTARA

HARGA BERAS NAIK DI BANTEN

Pekerja mengangkut beras di Pasar Induk Rau Kota Serang, Banten, (18/1). Harga beras kualitas premium naik dari Rp12.000 menjadi Rp13.000 per kilogram yang disebabkan cuaca buruk dan panen yang tidak serentak sehingga supplinya berkurang.

Kecewa Terhadap Kinerja Pj Gubernur, KMSB Temui Pimpinan DPRD Banten

SERANG (IM)- Kolaborasi Masyarakat Sipil Banten (KMSB) menemui pimpinan DPRD Banten untuk menyampaikan hasil evaluasi terhadap kinerja Pj Gubernur Banten, Al Muktabar selama delapan bulan. Rombongan KMSB diterima langsung oleh Ketua DPRD Banten, Andra Soni, pimpinan Komisi I DPRD Banten dan Sekretaris DPRD Banten di ruang rapat ketua dewan, Rabu (18/1).

Koordinator Presidium KMSB, Uday Suhada mengungkapkan, kedatangannya ke gedung wakil rakyat untuk menyampaikan hasil evaluasi KMSB terhadap kinerja Pj Gubernur Banten yang sudah memimpin lebih dari delapan bulan. "Hari ini kami akan menyerahkan tiga rekomendasi kepada DPRD Banten, terkait kinerja Pj Gubernur yang mengecewakan masyarakat Banten," kata Uday kepada wartawan di Gedung DPRD Banten.

Uday mengungkapkan, tiga rekomendasi KMSB yang diserahkan ke DPRD Banten, pertama mendorong Pimpinan DPRD Banten untuk membawa hasil evaluasi KMSB terhadap kinerja Pj Gubernur ke Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Banten, untuk mengusulkan pergantian Pj Gubernur Banten kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Kedua, meminta DPRD Banten segera berkoordinasi dengan Kemendagri untuk mendesak agar menyampaikan hasil evaluasi tiga bulanan terhadap Pj Gubernur secara transparan kepada rakyat Banten. Ketiga, mendesak DPRD Banten menghentikan pembahasan Raperda usul Pj Gubernur tentang Perampangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Ketiga rekomendasi ini kami sampaikan ke pimpinan DPRD Banten, setelah KMSB melakukan evaluasi kinerja Pj Gubernur Banten selama delapan bulan sejak 12 Mei 2022 hingga 12 Januari 2023 yang sangat mengecewakan," pungkaskan Uday. ● pra